

Forum Freedom

Tema : KONFLIK DAN MASA DEPAN DEMOKRASI

Narasumber : Indra J. Piliang

**Hamid Basyaib (HB):**

Halo. Selamat pagi saudara-saudara. Anda bersama saya, Hamid Basyaib, dalam acara Forum Freedom, sebuah acara yang disponsori oleh Freedom Institute bekerja sama dengan Kantor Berita Radio 68 H dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia.

Tamu saya pagi ini adaLah Indra J. Piliang (IJP). Selamat pagi Bung Indra. Dia adalah peneliti senior di CSIS, sebuah lembaga *think tank* di Indonesia sejak 30 tahun yang lalu, dan banyak menulis di media massa tentang politik kontemporer Indonesia. Dia juga banyak muncul di televisi sehingga namanya tidak perlu lagi diperkenalkan. Tema kita kali ini adalah Konflik dan Masa Depan Demokrasi.

Begini latar belakangnya Bung Indra. Sejak runtuhnya rezim Orde Baru, pada Mei 1998, Indonesia tiba-tiba menjelma menjadi negara ketiga terbesar di dunia. Ini tentu membanggakan, dan dalam konteks Islam, kita adalah satu-satunya negara Muslim yang berdemokrasi. Yang menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan.

Ini tentu membanggakan. Tapi ada satu hal yang menghawatirkan, yakni kecenderungan masyarakat untuk memaknai kebebasan dan demokrasi sebagai tidak terbatas. Orang memaknai demokrasi bukan sebagai kebebasan tapi sebagai keliaran.

Apa saja yang tidak sesuai dengan kemauan massa dipaksakan dan biasanya dengan menggunakan kekerasan. Dalam 10 tahun terakhir kita bisa lihat anarki itu, dan korbannya bisa ribuan jiwa. Masih hangat dalam ingatan kasus Ambon, Maluku dan Timika Papua. Dan Tuban 2006.

Pada 2006 Indonesia juga sukses mendamaikan pertikaian di Aceh melalui resolusi politik. Namun pada awal tahun ini konflik kembali muncul di Poso, Sulawesi Tengah. Dan kalau kita hitung seluruhnya ada 115 kali kasus tindak kekerasan bersenjata. Juga 36 kali aksi bom.

Nah, di sisi ini, demokrasi tampaknya menunjukkan tanda-tanda yang suram. Bagaimana anda menanggapi hal ini, yakni bahwa konflik dan kekerasan itu sering kali dikaitkan dengan demokrasi. Banyak segmen masyarakat kita yang yakin bahwa tampaknya konflik ini adalah bagian dari demokrasi. Bagaimana menurut anda.

**IJP:**

Kita lihat bahwa memang kenyataannya demikian. Tapi megaitkan konflik-konflik itu dengan demokrasi adalah suatu hal yang berbeda. Memang konflik juga terjadi dulu zaman Orba, namun konflik itu lebih tertutup. Setelah reformasi, konflik itu menjadi terbuka.

Ada beberapa jenis konflik. Ada akarnya, daunnya, cabangnya, dahan-dahannya, dan lain-lain. Sedangkan yang kita lihat sekarang adalah konflik yang menjadi semakin terbuka. Tapi memang demokrasi itu sendiri kan mengandung unsur konflik. Yakni manajemen konflik. Salah satu tugas partai adalah memfasilitasi manajemen konflik yang terjadi di publik. Yang perlu dicatat adalah bahwa banyak konflik di Indonesia berubah menjadi anarkisme. Apakah demokrasi menyumbang ke arah itu, satu justru tidak melihat. Salah satu buktinya adalah tidak ada bom yang meletus di kotak-kotak suara saat pemilu digelar. Bahkan dalam pilkada pun tidak ada. Data yang paling menarik dari pilkada adalah hampir semua pilkada yang digelar di daerah konflik atau pascakonflik itu tidak kemudian memunculkan konflik.

**HB:**

Dan tidak ada korban jiwa ya.

**IJP:**

Tidak ada korban jiwa satu pun di daerah konflik. Konflik itu kan terjadi di Bengkulu, Tana Toraja, Tuban, Gresik. Masalahnya adalah apakah aktor-aktor yang masuk ke dalam demokrasi ini mau tidak menerima hasilnya. Menerima hasil itu dan tidak mempolitisasinya untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan kemudian menjadi konflik yang bersifat terbuka.

Konflik yang terjadi di Poso sekarang adalah yang lebih bersifat vertikal, yakni antara aparaturnegara atau pemerintah dan masyarakat. Yang saya lihat sekarang adalah lebih pada masalah manajemen pemerintahan dan manajemen konflik di era demokrasi.

**HB:**

Jadi anda tidak melihat hubungan itu.

**IJP:**

Ya.

**HB:**

Lalu apa faktor terbesar yang menjadi ciri khas konflik-konflik di Indonesia ini.

**IJP:**

Lebih banyak persaingan antar-elite.

**HB:**

Selama ini di Poso kan ada persaingan agama. Di berbagai daerah ada konflik-konflik yang bernuansa religius maupun etnisitas. Apakah memang menurut anda itu ciri utamanya.

**IJP:**

Saya kira bukan itu. Agama hanya tameng. Seingat saya untuk konflik Poso itu diawali dengan persaingan elite-elite politik pemerintahan lokal. Konflik Sampit juga begitu. Ada komposisi yang tidak seimbang di antara etnis-etnis lokal. Di Maluku juga begitu, di Ambon juga.

Kita tahu ada demoralisasi yang terjadi di tubuh bangsa ini, ketika negara Orba runtuh, masyarakat sepertinya kehilangan pegangan. Orba waktu itu kan tampaknya sangat kuat dan tak tergantikan. Akhirnya masyarakat mencari pegangan yang paling dekat yaitu pertalian darah, agama, etnis, dsb. Itu yang terjadi.

Yang juga saya lihat adalah masalah profesionalisme aparat. Ketika konflik itu terjadi, terutama sepanjang 1999 hingga 2001, ini adalah fase liberalisasi politik, penyusunan Undang-undang dan gonjang-ganjing di Jakarta. Gus Dur mau dijatuhkan, Habibie dijatuhkan, dan macam-macam. Pemerintah pusat sama sekali tidak bekerja.

Yang terjadi adalah orang-orang datang ke istana presiden dan DPR dengan jempol darah, pasukan berani mati, dll. Tidak ada kontrol. Masyarakat jadi kehilangan kendalinya.

Jadi bukan karena faktor agama. Agama hanya kendaraan akhir. Juga kita lihat konflik karena sumber daya alam. Di Bangka Belitung, Freeport, di Buyat, Semen Padang dan sebagainya. Jadi motifnya lebih karena faktor ekonomi.

**HB:**

Jadi bukan karena saya ini etnis A atau agama B maka saya membenci etnis C atau agama D.

**IJP:**

Bukan. Bukan karena itu. Saya juga belajar ilmu sejarah. Saya mengikuti fase-fase sejarah bangsa ini. Masyarakat kita ini sangat terbuka.

**HB:**

Sejak ratusan tahun yang lalu ya.

**IJP:**

Ya. Sejak ratusan tahun yang lalu. Bangsa kita ini tidak pernah punya pengalaman mencetak senjata canggih. Yang kita punya ini hanya clurit, pedang, keris, golok, anak panah dan tombak. Paling jauh yang kita punya adalah meriam yang kita dapatkan dari Portugis dan Belanda.

Jadi saya curiga, ada bom dan lain sebagainya itu. Itu bukan bangsa ini. Saya pikir itu semua lebih banyak karena faktor krisis.

**HB:**

Sedikit lagi sebelum kita istirahat. Jadi menurut anda faktor-faktor konflik di daerah-daerah itu berbeda-beda atau sama. Antara Aceh, poso, Ambon, dan lain-lain itu berbeda-beda, atau ada titik-titik persamaan.

**IJP:**

Salah satu persamaannya adalah resistensi terhadap pusat. Pusat melakukan kekeliruan. Pusat ingin persatuan. Kata Mohammad Hatta adalah persatuan bukan persatean. Yang terjadi selama ini adalah persatean bukan persatuan.

Artinya daerah ditusuk seperti sate sesuai dengan keinginan pusat. Bukan seperti keinginan daerah. Itu yang kemudian berubah menjadi GAM, OPM, dan lain-lain. Masalah Newmont itu juga masalah berapa kontribusi buat daerah, demikian juga Freeport. Itu salah satu persamaan. Tapi perbedaan lain ada. Berbeda-beda.

**HB:**

Baik. Bung Indra kita istirahat sebentar. Saudara, anda masih bersama saya, Hamid Basyaib, dalam Forum Freedom dan kita akan beristirahat sebentar. Dan akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.

\*\*\*

**HB:**

Selamat pagi kembali, saudara-saudara. Anda masih bersama saya, Hamid Basyaib. Kita masih dalam acara Forum Freedom. Tamu kita masih yang tadi, yakni Bung Indra J. Piliang.

Tadi dia berbicara tentang konflik-konflik daerah yang punya titik-titik persamaan. Juga ada berbagai perbedaan. Intinya dia mengatakan bahwa demokrasi itu tidak ada hubungannya dengan konflik. Dan konflik-konflik di Poso, Aceh, Papua dan sebagainya itu sebenarnya adalah konflik-konflik politik dan bukan konflik agama. Ini adalah konflik para elite yang kemudian bertopengkan agama.

Bung Indra, terakhir tadi anda mengatakan bahwa konflik-konflik tersebut titik persamaannya adalah ketidakpuasan dengan pusat. Karena pusat menguras sumber daya daerah.

Nah, kalau kita kaitkan hal ini dengan perdamaian di Aceh. Sekarang Aceh sudah maju dengan pemilihan kepala daerah yang sukses. Apakah berarti masalah persatean seperti yang anda katakan tadi sudah diselesaikan di Aceh dan karena itu mereka sekarang ini lebih damai.

**IJP:**

Saya kira banyak faktor yang menyebabkan berbagai pihak sekarang ini berdamai di Aceh. Tsunami juga merupakan triggernya, ketimbang yang lain.

**HB:**

Jadi titik temunya itu tsunami.

**IJP:**

Ya. Tsunami. Jadi ada dukungan nasional dan internasional untuk perdamaian di Aceh. Bagaimana mungkin mengirim bantuan lalu di jalanan ada orang bersenjata, lalu bertikai dan merampas bantuan itu. Kedua belah pihak akan saling menyalahkan.

Ini yang menjadi motif sebenarnya kalau kita mau jujur. Karena kalau saya lihat, saya sudah lama bergulat dengan soal Aceh dan Papua ini, selalu ada resistensi dari kelompok nasionalis dan ultranasionalis yang ada di Jakarta. Ada desain yang mereka ciptakan untuk terus memelihara konflik.

Bahkan konflik Lampung pun sepertinya ingin mereka awetkan.

**HB:**

Maksud anda konflik talangsari?

**IJP:**

Bukan. Konflik gubernur. Terakhir kan ada kesepakatan untuk menerima Syahrudin. Tapi itu kan diawetkan lebih dari 1,5 tahun. Keputusannya sudah jelas oleh Mahkamah Agung. Ini hanya masalah siapa yang menjadi gubernur Lampung. Ini lebih dari 1,5 tahun masalahnya.

Yang saya mau katakan adalah bahwa kita menjalankan demokrasi tanpa adanya kaum demokrat. Kalau anda dibuat kere oleh demokrasi ya sudah terima. Kalau ada yang mengatakan memiliki aspirasi daerah, dan mengatakan mewakili kepentingan lokal, seperti pemekaran wilayah, lalu resistensi dan mulai menyerang pusat, Jakarta, saya terus terang saja merasa aspirasinya mulai tidak otentik.

Kalau memang jakarta menyedot daerah, jika kita lihat ini dulu kan juga didukung oleh rezim-rezim daerah. Orang-orangnya sekarang mungkin sama dan sekarang mereka teriak. Dulu mereka bagian dari kekuasaan dan sekarang mulai teriak. Memang ada yang betul-betul otentik, tapi jumlahnya sangat terbatas.

Jadi saya melihat masalah demokrasi kita bukan karena sistem atau desainnya tapi lebih karena aktor-aktornya.

**HB:**

Nah, sekarang menurut anda bagaimana strategi dari demokrasi untuk menyelesaikan konflik-konflik itu.

Kita sepakat dengan anda bahwa konflik-konflik itu bukan disebabkan oleh demokrasi. Tapi kalau konflik-konflik itu terus membayangi kehidupan kita, apakah demokrasi punya strategi untuk menyelesaikan itu semua.

**IJP:**

Punya. Sebenarnya punya. Persoalannya adalah apakah demokrasi ini sudah berjalan secara substantif atau prosedural. Untuk menjadi demokrasi yang substantif banyak sekali syaratnya. Misalnya partai-partai harus lebih modern.

**HB:**

Yang anda maksud partai politik menjadi modern itu bagaimana. Apakah selama ini partai politik kita kurang modern.

**IJP:**

Belum modern. Menurut saya masih sangat tradisional. Lebih kepada masalah manajemen kepartaian. Selama ini kita melihat partai lebih pada masalah ideologinya. Dari Feith, misalnya, kita belajar tentang nasionalisme, kemudian tradisionalisme Islam, dan bahkan fasisme dan komunisme. Menurut saya masalah kita sekarang bukan isme-isme itu lagi.

Yang ingin saya katakan adalah bahwa persoalan untuk menjadi partai modern itu sangat sederhana. Ini masalah manajemen partai. Bagaimana anda dalam partai politik itu lebih terkonsentrasi pada siapa yang menjadi ketua umum ketimbang laporan keuangan pengurus sebelumnya.

**HB:**

Semua begitu ya. Yang dinanti-nantikan adalah pemilihan ketua baru.

**IJP:**

Ya. Semuanya begitu. Dan selalu saja ketika ada pemilihan ketua baru, itu hard-disk laporan keuangan pengurus sebelumnya itu hilang dari komputer.

**HB:**

Sekarang kembali ke pertanyaan saya. Bagaimana strategi demokrasi mengatasi masalah konflik yang masih aktual maupun yang potensial.

**IJP:**

Secara sederhana saya katakan bahwa demokrasi bisa menyelesaikan hal itu dengan cara memetakan semua persoalan di atas meja. Artinya kalau anda punya persoalan, bicarakan. Kita bisa lihat skala prioritas. Bicarakan persoalan itu, lalu ambil keputusan dan pegang keputusan itu. Lalu evaluasi pada saat harus dievaluasi.

**HB:**

Artinya itu masalah manajemen. Ilmunya sudah ada semua.

**IJP:**

Ya, masalah manajemen. Memang masalah politik kita lebih sering dilihat dalam kerangka akademisi, bukan dalam kerangka manajemen. Ini yang melanda bangsa kita. Ada kritikan bahwa dunia LSM juga begitu.

**HB:**

Dengan kata lain anda ingin mengatakan bahwa ini masalah mental. Mana yang duluan, sistem atau manusia. Mana yang saling menciptakan. Ini masalah mental untuk menerima hasil demokrasi apa pun itu. Artinya bukan karena mereka tidak mengerti ilmunya. Tapi lebih karena ketidakmauan politik.

**IJP:**

Ya lebih karena persoalan mentalitas. Makanya selalu ada jarak antara dunia intelektual dan dunia politik. Dunia intelektual yang skeptis dengan dunia politik, sementara dunia politik mengatakan bahwa dunia intelektual itu hanya berwacana.

Kalau kita membaca bukunya Pak Daud Yusuf itu sangat menarik perdebatan yang coba dia bangun tentang keberadaan dan perbedaan politisi. Dia juga masih menulis di koran-koran hingga sekarang ini. Dan itu sangat ideal dan filosofis dalam melihat persoalan itu.

Salah satu perdebatan yang masih saya ingat adalah dengan Pak Harto. Pak Harto mengatakan bahwa saya tidak ingin negara ini jatuh ke tangan politisi. Saya ingin negara ini jatuh ke tangan ilmuwan. Nyatanya Pak Harto menepati janjinya dan memberikan jabatannya ke Habibie.

Yang ingin saya katakan adalah bahwa sudah ada kalangan yang belajar manajemen yang bagus. Dan politisi tinggal mengadopsi hal ini. Harus ada titik singgung, titik temu. Demikian juga di kalangan manajemen, kaum profesional kita. Rata-rata kaum profesional kita kan tidak peduli dengan politik. Mereka mengikuti perkembangan dunia tapi tidak politik lokal. Ada yang tidak nyambung di sini.

Sementara para politisi sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan kursinya, ketuanya, dsb. Kadang-kadang kursinya dibawa ke mana-mana agar tidak diduduki oleh orang lain.

Jadi harus ada titik temu sehingga demokrasi menghasilkan satu ruang yang warna-warni dengan berbagai macam keahlian dan profesi. Jadi masalah mentalitas itu lebih menentukan.

**HB:**

Satu lagi Bung Indra. Kalau konflik terus berlanjut, apa ancamannya bagi demokrasi itu sendiri.

**IJP:**

Demokrasi bisa hancur dan kemudian ada keinginan dari bangsa ini agar muncul dinasti baru, mungkin, atau otoritarianisme baru. Dan bangsa ini kan memang banyak berpikir ke arah sana. Misalnya satria piningit, dsb.

Saya khawatir kalau bangsa yang terbuka ini kembali ke zaman itu. Apa jadinya, bung Hamid. Jadi demokrasi dan liberalisasi politik ini tidak bisa dihentikan. Ibaratnya kita ini melaju di jalan tol, dan kalau ada yang menginjak rem tiba-tiba, mobil bisa terbalik. Kalau ada orang atau kelompok yang menginjak gas dan menghalangi demokrasi, bangsa ini bisa terbalik.

**HB:**

Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Saya percaya anda optimis. Itu yang saya sukai dari anda.

Baik Bung Indra, waktunya habis. Terima kasih atas kehadiran anda di studio. Saudara-saudara begitulah akhir Forum Freedom minggu ini. Anda bisa berkomentar ke 021-70497497. Saya Hamid Basyaib mohon diri, kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalam.

